

# **PENERAPAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PROGRAM PENCEGAHAN STUNTING DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023**

**Oleh : Lilis Octaviana**

**Pembimbing : Ben Hansel Notatema Zebua, S.I.P., MA**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12.5 Simpang Baru Pekanbaru, 28293

Telp/Fax : 0761-6327

## **ABSTRAK**

*Stunting* merupakan permasalahan kesehatan masyarakat yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa depan sehingga memerlukan penanganan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis Penerapan *Collaborative Governance* dalam Program Pencegahan *Stunting* di Kota Pekanbaru Tahun 2023. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis menggunakan teori *Collaborative Governance* Ansell dan Gash yang meliputi kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan, dan proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *collaborative governance* dalam pencegahan *stunting* di Kota Pekanbaru telah berjalan melalui Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) dengan melibatkan Pemerintah Kota Pekanbaru, BKKBN, Dinas Kesehatan, sektor swasta seperti PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), serta masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa *collaborative governance* dalam program pencegahan *stunting* di Kota Pekanbaru Tahun 2023 telah diterapkan namun belum berjalan secara maksimal. Diperlukan penyusunan regulasi yang lebih kuat agar kolaborasi yang dibangun dapat berjalan berkelanjutan dan efektif dalam menurunkan angka *stunting*.

**Kata kunci : Collaborative Governance, Pencegahan Stunting, Pekanbaru**

## **ABSTRACT**

*Stunting is a public health problem that impacts the quality of future human resources and therefore requires multi-stakeholder intervention. This study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the stunting prevention program in Pekanbaru City in 2023. The study used a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews and documentation. The analysis utilized Ansell and Gash's collaborative governance theory, which encompasses initial conditions, facilitative leadership, institutional design, and collaboration processes. The results indicate that collaborative governance in stunting prevention in Pekanbaru City has been implemented through the Foster Parents and Stunting Children (BAAS) Program, involving the Pekanbaru City Government, the National Population and Family Planning Board (BKKBN), the Health Office, the private sector such as PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), and the community. The study concluded that collaborative governance in the stunting*

*prevention program in Pekanbaru City in 2023 has been implemented but has not yet been optimally implemented. Stronger regulations are needed to ensure sustainable and effective collaboration in reducing stunting rates.*

**Keywords:** Collaborative Governance, Stunting Prevention, Pekanbaru

## PENDAHULUAN

*Stunting* diartikan sebagai gangguan pertumbuhan yang menyebabkan keterlambatan perkembangan fisik anak usia dini. (Fatikha & Permatasari, 2023). Berdasarkan data di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *stunting* di Indonesia tahun 2023 berada pada angka 21,5 persen. Data *stunting* jika hanya pada Provinsi Riau tahun 2023, hanya berada pada angka 13,6 persen sedangkan data *stunting* di Kota Pekanbaru hanya sebesar 8,7 persen.

**Tabel 1.1 Persentase Stunting Per Kabupaten/Kota Provinsi Riau**

Kabupaten/Kota	Persentase (%)
Kampar	7,60 %
Kota Pekanbaru	8,70 %
Pelalawan	10,10 %
Siak	10,40 %
Indragiri Hulu	12,70 %
Kota Dumai	14,90 %
Rokan Hulu	15,90 %
Rokan Hilir	16,60 %
Bengkalis	17,90 %
Indragiri Hilir	18,80 %
Kep. Meranti	19,60 %
Kuantan Singingi	23,00 %
<b>Total</b>	<b>13,6 % dari 21,5 %</b>

Sumber : Buku Saku Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021,2022 dan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) 2023

*Stunting* termasuk kedalam urusan pemerintahan konkuren, untuk

menindaklanjuti hal tersebut dibentuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*. Pada Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* dijelaskan bahwa setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah dan desa. Peraturan Presiden tersebut memuat tindakan yang harus dilakukan pihak-pihak terkait dalam pemberantasan *stunting*.

Untuk mencegah *stunting* di Kota Pekanbaru, dibentuk Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2021 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *stunting* dilakukan secara konvergensi dengan melibatkan lintas program dan lintas sektor terkait yang dilaksanakan dalam 8 aksi, yaitu, analisis situasi, rencana kegiatan, rembuk *stunting*, Peraturan Walikota terkait peran kelurahan dalam Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan *stunting*, peningkatan kapasitas Komunitas, Perilaku dan Makanan (KPM), manajemen data, pengukuran dan publikasi, serta review kinerja tahunan. Setelah dibentuknya Peraturan Walikota Pekanbaru Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2021, angka *stunting* di Kota Pekanbaru tercatat sebanyak 303

kasus pada tahun 2022, 243 kasus pada tahun 2023 dan 227 kasus pada tahun 2024 (Fernando, 2023).

Dalam mencegah *stunting* di Kota Pekanbaru, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru membentuk tim percepatan penurunan *stunting* yang berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 548 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 263 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Pekanbaru. Tim percepatan penurunan *stunting* mengadakan Program Bapak/Bunda Asuh Anak *Stunting* (BAAS). Program BAAS dilakukan dengan cara memberikan bantuan makanan bergizi ke keluarga yang memiliki anak berisiko *stunting* bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Walikota Pekanbaru telah menunjuk Kepala Perangkat Daerah dan Camat se-Kota Pekanbaru sebagai Bapak/Bunda Asuh. Pemerintah Kota Pekanbaru menganggarkan Rp 42,03 miliar dalam pencegahan *stunting* pada tahun 2023 (Pekanbaru, 2024).

Pencegahan *stunting* menjadi tugas pemerintah yang sangat besar sehingga memerlukan kolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait kesadaran masyarakat mengenai dampak *stunting* menjadi tantangan tersendiri. Program BAAS menjadi upaya mengeliminasi kasus *stunting* yang diluncurkan BKKBN sebagai gerakan gotong royong dari seluruh elemen bangsa dalam mempercepat penurunan *stunting* dan menyasar langsung anak berisiko *stunting*.

Masyarakat, institusi, perusahaan, dan *stakeholder* secara aktif bersama-sama sebagai Bapak Asuh melakukan intervensi dan kontribusi untuk terlibat aktif memberikan bantuan penanganan *stunting*. Pertamina Hulu Rokan melakukan penyerahan bantuan peralatan posyandu dan bantuan BAAS Tahap IV kepada keluarga berisiko *stunting* dengan dibersamai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru Drs. H. Muhammad Amin, M. Si (Center, 2024).

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan *collaborative governance* yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pencegahan *stunting* tahun 2023?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi *collaborative governance* dalam pencegahan *stunting* di Kota Pekanbaru pada tahun 2023?

## TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui Penerapan dan Faktor Pengaruh *Collaborative Governance* dalam Program Pencegahan *Stunting* di Kota Pekanbaru Tahun 2023.

## TINJAUAN TEORI

### **Teori Collaborative Governance**

*Collaborative Governance* merupakan model strategi dari pemerintahan yang melibatkan pihak swasta dan masyarakat secara bersamaan dalam sebuah forum aparatur pemerintahan untuk membuat keputusan bersama yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak bisa dihadapi oleh pemerintah sendiri.

*Collaborative Governance* dapat dilaksanakan pemerintah daerah dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik dengan melakukan kerjasama dengan para pihak lain yang terkait proses penyelesaian masalah tersebut (Saufi, 2021).

Model *Collaborative Governance* menurut (Ansell,C.,&Gash,2008) terdiri dari beberapa tahap yaitu :

1. Kondisi awal

Pada tahapan ini relasi antar *stakeholder*, masing- masing para aktor memiliki latar belakang yang berbeda sehingga dapat menghasilkan sebuah hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan.

2. Kepemimpinan fasilitatif

Ryan dalam Ansell dan Gash mengelompokkan tiga komponen kepemimpinan kolaboratif yang efektif yaitu :

a. Manajemen yang cukup dalam proses kolaborasi

b. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis

c. Memastikan kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang bersifat kredibel dan meyakinkan bagi para aktor.

3. Desain kelembagaan

Desain institusional merujuk pada protokol dasar dan aturan- aturan dasar untuk kolaborasi secara kritis yang ditekankan adalah legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi, pemerintah harus bersifat terbuka dan inklusif.

4. Proses kolaborasi

Gray dalam Ansel dan Gash (2008) mengelompokkan tiga tahapan proses kolaborasi antara lain penentuan

permasalahan (*Problem Setting*), penentuan tujuan (*Direction Setting*) dan implementasi. Tahapan ini membentuk kolaboratif sebagai berikut :

- a. Dialog tatap muka (*face to face*) yang berkaitan dengan dialog tatap muka atau komunikasi awal antar *stakeholder* untuk memecahkan hambatan komunikasi dan pertentangan pandangan dalam suatu proses kolaborasi.
- b. Membangun kepercayaan (*trust building*) berarti kepercayaan dihadirkan dalam proses kolaborasi khususnya diantara *stakeholder*. Dengan adanya kepercayaan maka pencapaian kolaborasi akan udah terwujud.
- c. Komitmen terhadap proses (*commitment to process*) berkaitan dengan tanggungjawab dan kesetiaan dari para *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi yang memiliki tujuan mengembangkan keuntungan bersama dan cara terbaik dalam meraih hasil yang diinginkan.
- d. Hasil *Collaborative Governance* (*Intermediate Outcome*) berkaitan dengan keberhasilan yang mengarah kepada proses kolaborasi yang sukses. Keberhasilan memberi umpan balik ke dalam proses sehingga mendorong siklus dari membangun kepercayaan dan komitmen antar aktor.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek

penelitian, misalnya perilaku, perspektif, motivasi, tindakan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Safrudin et al., 2023). Adapun alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data berupa tulisan dan ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Penerapan *Collaborative Governance* dalam Program Pencegahan *Stunting* di Kota Pekanbaru Tahun 2023.

Data primer yang dikumpulkan adalah hasil wawancara antara peneliti dengan informan yang terkait, terlibat langsung dan kompeten tentang permasalahan yang diangkat untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai penelitian (Pahlepi, 2022). Data sekunder dalam penelitian bisa diperoleh dari sumber berupa literatur-literatur seperti buku, skripsi, jurnal dan data pendukung dari sumber informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian (Rukhmana, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan *Collaborative Governance* dalam Program Pencegahan *Stunting* di Kota Pekanbaru Tahun 2023

Pembahasan difokuskan pada bagaimana proses kolaborasi antar pemangku kepentingan dilaksanakan, serta sejauh mana kolaborasi tersebut berkontribusi terhadap upaya pencegahan dan penurunan stunting di tingkat daerah. Dalam penelitian Penerapan *Collaborative Governance* dalam Program Pencegahan *Stunting* di Kota Pekanbaru Tahun 2023 peneliti menggunakan indikator dari Ansell & Gash (2008) yakni kondisi

awal, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan dan proses kolaborasi.

#### 1. Kondisi Awal

Kondisi awal merepresentasikan relasi yang terbentuk antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat dalam suatu proses kolaborasi. Setiap aktor yang terlibat membawa latar belakang institusional, kepentingan organisasi, kewenangan, serta sumber daya yang berbeda-beda, baik dalam bentuk kebijakan, anggaran, maupun kapasitas teknis. Perbedaan tersebut tidak hanya memengaruhi cara pandang aktor terhadap permasalahan yang dihadapi, tetapi juga berpotensi membentuk pola hubungan yang beragam, mulai dari hubungan yang bersifat kooperatif hingga hubungan yang memerlukan proses penyesuaian dan negosiasi.

Dalam konteks kolaborasi pencegahan *stunting*, kondisi awal menjadi pijakan yang sangat penting untuk menilai sejauh mana hubungan antar aktor tersebut dapat saling melengkapi dan mendukung pencapaian tujuan bersama, khususnya dalam upaya menurunkan angka *stunting* secara efektif dan berkelanjutan.

#### 2. Kepemimpinan Fasilitatif

Dalam konteks kolaborasi pencegahan *stunting* di Kota Pekanbaru, kepemimpinan fasilitatif tercermin melalui pembentukan dan penguatan struktur organisasi Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kota Pekanbaru sebagai wadah koordinasi lintas sektor. Struktur organisasi tersebut menempatkan Wali Kota Pekanbaru

sebagai ketua pengarah, sementara jabatan ketua pelaksana diemban oleh Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.

Penempatan pimpinan daerah pada posisi strategis dalam struktur TPPS menunjukkan adanya komitmen dan keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan bahwa proses koordinasi, integrasi kebijakan, serta sinergi program antar aktor dapat berjalan secara terarah dan berkesinambungan. Melalui kepemimpinan ini, pemerintah daerah berperan tidak hanya sebagai pengambil keputusan, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru.

### 3. Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merupakan aspek penting yang mengacu pada pengaturan tata cara, mekanisme kerja, serta aturan dasar yang menjadi pedoman dalam menjalankan suatu kerja sama antar aktor. Keberadaan desain kelembagaan memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan legitimasi prosedural terhadap proses kerja sama, karena melalui desain inilah struktur organisasi, pembagian peran, serta alur koordinasi antar pemangku kepentingan ditetapkan secara formal.

Dalam konteks *collaborative governance*, indikator desain kelembagaan menjadi salah satu kunci keberhasilan kolaborasi, sebab mampu menciptakan kejelasan peran, meningkatkan

akuntabilitas, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya desain kelembagaan harus dilandasi oleh prinsip keterbukaan dan inklusivitas agar seluruh aktor yang terlibat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan.

**Tabel 3.1 Susunan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kota Pekanbaru Tahun 2023**

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan
1.	Ketua	Walikota Pekanbaru
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB
4.	Anggota	1. Kepala Dinas Kesehatan 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan

	<p>an Masyarakat</p> <p>4. Kepala Dinas Sosial</p> <p>5. Kepala Dinas Pendidikan</p> <p>6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum</p> <p>7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan</p> <p>8. Kepala Dinas Komunikasi dan informatika</p> <p>9. Tim Penggerak PKK Kota Pekanbaru</p>
--	---

Sumber : Data Olahan Penulis, 2026

Kondisi ini sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash mengenai *collaborative governance*, di mana keterlibatan aktor yang beragam sejak tahap awal (*starting conditions*) menjadi faktor kunci dalam membangun kolaborasi yang efektif. Kehadiran berbagai OPD dalam struktur TPPS Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa desain kelembagaan telah dirancang untuk mendorong kerja sama lintas sektor secara formal dan terstruktur.

#### 4. Proses Kolaborasi

Proses kolaboratif merupakan inti dari pelaksanaan *collaborative governance*, karena aspek ini menjadi penentu utama dalam keberhasilan maupun kegagalan rangkaian kegiatan kolaborasi yang dijalankan. Proses kolaboratif tidak hanya dimaknai sebagai bentuk kerja sama antar aktor,

tetapi juga sebagai rangkaian interaksi yang berlangsung secara berkelanjutan melalui komunikasi, koordinasi, serta pengambilan keputusan bersama.

Proses tersebut disesuaikan dengan kondisi yang berkembang dalam pelaksanaan di lapangan dan tetap berorientasi pada tujuan utama yang hendak dicapai melalui kolaborasi, yaitu terwujudnya penurunan angka stunting secara efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, proses kolaboratif menuntut adanya fleksibilitas, keterbukaan, serta komitmen dari seluruh aktor yang terlibat agar setiap tahapan pelaksanaan dapat berjalan secara sinergis.

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting*, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Kebijakan ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan melaksanakan program-program intervensi *stunting* secara terintegrasi dan kolaboratif. Pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2023 telah menyediakan data terkait keluarga berisiko *stunting* sebagai bagian dari upaya perencanaan dan penentuan sasaran program secara tepat. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, tercatat sebanyak 70.594 keluarga berisiko *stunting* di Kota Pekanbaru, yang tersebar di seluruh kecamatan.

**Tabel 3.2 Sebaran Keluarga Berisiko Stunting di Kecamatan Kota Pekanbaru Tahun 2023**

No	Kecamatan	Keluarga Berisiko <i>Stunting</i>
1.	Sail	1141
2.	Pekanbaru Kota	1281
3.	Senapelan	182
4.	Lima Puluh	1867
5.	Rumbai Barat	2442
6.	Sukajadi	2462
7.	Rumbai Timur	2894
8.	Bina Widya	4995
9.	Kulim	5419
10.	Payung Sekaki	5432
11.	Bukit Raya	5903
12.	Tenayan Raya	6704
13.	Rumbai	7065
14.	Marpoyan Damai	8467
15.	Tuah Madani	12700
<b>Total</b>		<b>70.594</b>

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekanbaru, 2023

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah keluarga yang berisiko *stunting* di Kota Pekanbaru pada tahun 2023 tercatat sebanyak 70.594 keluarga. Kelompok sasaran yang termasuk dalam kategori berisiko *stunting* antara lain anak gadis, calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, balita, serta masyarakat dengan keterbatasan daya beli pangan. Kelompok-kelompok tersebut memiliki kerentanan yang berbeda-beda terhadap terjadinya *stunting*, baik dari aspek gizi, kesehatan, maupun kondisi sosial ekonomi.

### 3.1.4 Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogue*)

Menurut teori *Collaborative Governance* yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash, dialog tatap muka (*face to face dialogue*) memegang

peranan yang sangat penting dalam membangun saling pengertian, kepercayaan, serta kesepahaman di antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam suatu kolaborasi. Dialog tatap muka menjadi ruang interaksi langsung yang memungkinkan setiap aktor menyampaikan pandangan, kepentingan, serta kapasitas yang dimiliki secara terbuka.

Melalui mekanisme ini, proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan program menjadi lebih partisipatif dan inklusif, karena setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat secara aktif dalam memberikan masukan, mengidentifikasi permasalahan dan tantangan di lapangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang disepakati bersama. Dengan demikian, dialog tatap muka tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi terciptanya koordinasi yang efektif, pengambilan keputusan bersama, serta kolaborasi yang berkelanjutan dalam upaya percepatan penurunan *stunting*.

### 3.4.2 Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Dalam proses kolaborasi, membangun rasa saling percaya antar pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat utama, mengingat para pihak yang terlibat memiliki kepentingan, latar belakang, perbedaan pandangan, kewenangan, serta kapasitas yang beragam. Perbedaan-perbedaan tersebut berpotensi memunculkan ego sektoral apabila tidak dikelola dengan baik, sehingga dapat menghambat jalannya kolaborasi dan pencapaian tujuan bersama.

Oleh karena itu, kepercayaan menjadi elemen fundamental yang harus dibangun sejak awal proses kolaborasi agar setiap aktor bersedia membuka diri, berbagi informasi, serta berkomitmen untuk bekerja secara kolektif. Kepercayaan yang berhasil dibangun akan memberikan dampak berkesinambungan terhadap kelancaran proses kolaborasi, meningkatkan efektivitas koordinasi, serta memperkuat sinergi antaraktor.

**3.4.3 Komitmen Terhadap Proses (Commitment to Process)**

Sebagai bentuk komitmen dalam percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan rembuk *stunting* yang dihadiri oleh seluruh aktor yang terlibat, baik dari unsur pemerintah maupun swasta, dalam kolaborasi percepatan penurunan *stunting*. Kegiatan rembuk *stunting* ini menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi, menyelaraskan kepentingan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program penurunan *stunting*. Kegiatan rembuk *stunting* ini menjadi forum strategis untuk menyatukan persepsi, menyelaraskan kepentingan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program penurunan *stunting*.

Rembuk *stunting* juga berfungsi sebagai wadah evaluasi dan perencanaan bersama, di mana setiap aktor dapat menyampaikan peran, kontribusi, serta dukungan yang akan diberikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Dengan adanya kesepakatan yang dibangun melalui rembuk *stunting*, diharapkan pelaksanaan intervensi,

baik yang bersifat spesifik maupun sensitif, dapat berjalan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

#### **3.4.4 Hasil Sementara (*Intermediate Outcome*)**

Dalam proses kolaborasi, hasil *collaborative governance* merupakan tahapan lanjutan yang diwujudkan dalam bentuk output atau keluaran nyata dari keseluruhan proses kolaborasi yang telah dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan. Hasil ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana proses kolaboratif mampu menghasilkan tindakan konkret yang berdampak langsung pada pencapaian tujuan bersama.

Dalam konteks percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru, hasil proses kolaborasi tersebut diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi serta melibatkan lintas sektor. Secara keseluruhan, kolaborasi ini menghasilkan lima output utama, yaitu pembentukan tim audit kasus *stunting*, pelaksanaan kegiatan mini lokakarya, pelaksanaan rembuk *stunting*, pelatihan penggunaan aplikasi ELSIMIL, serta orientasi Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak pelaksanaan program di tingkat lapangan.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga melaksanakan dan menerapkan program Bapak Anak Asuh Stunting (BAAS) yang diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program BAAS merupakan salah satu bentuk kolaborasi berbasis gotong royong yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya menurunkan angka *stunting*,

khususnya melalui pendampingan dan dukungan kepada keluarga yang memiliki anak *stunting*.

Partisipasi dalam program BAAS melibatkan berbagai pihak di Kota Pekanbaru, baik dari kalangan pemangku kepentingan, dunia usaha, maupun masyarakat yang berperan sebagai pemberi dukungan dalam bentuk bantuan pencegahan *stunting*, baik berupa bantuan finansial maupun makanan bergizi bagi kelompok anak usia 0–2 tahun sebagai periode emas pertumbuhan.

Dalam sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina Hulu Rokan (PHR) turut berperan aktif dalam mendukung percepatan penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru. Kontribusi PHR diwujudkan melalui penyerahan bantuan peralatan posyandu serta bantuan Program BAAS Tahap VI yang disalurkan di wilayah Kelurahan Umban Sari dan Kelurahan Lembah Sari. Bantuan tersebut bertujuan untuk memperkuat sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar serta mendukung keberlanjutan pelaksanaan intervensi *stunting* di tingkat kelurahan.

**Tabel 3.3 Wilayah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru Yang Menjadi Intervensi PHR Dalam Pencegahan Stunting di Kota Pekanbaru Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Kelurahan
1.	Kecamatan Rumbai	1. Kelurahan Lembah Damai 2. Kelurahan Rumbai Bukit 3. Kelurahan Meranti Pandak
2.	Kecamatan	1. Kelurahan Tebing Tinggi Okura 2. Kelurahan Lembah Sari

Sumber : Pertamina Hulu Rokan (PHR), 2023

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3, wilayah intervensi PHR dalam pencegahan *stunting* di Kota Pekanbaru pada tahun 2023 mencakup beberapa kecamatan dan kelurahan yang menjadi lokasi prioritas. Di Kecamatan Rumbai, intervensi dilakukan di Kelurahan Lembah Damai, Kelurahan Rumbai Bukit, dan Kelurahan Meranti Pandak.

Sementara itu, di kecamatan lainnya, intervensi dilakukan di Kelurahan Tebing Tinggi Okura dan Kelurahan Lembah Sari. Penetapan wilayah intervensi tersebut menunjukkan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pihak swasta dalam menentukan lokasi prioritas berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerentanan terhadap *stunting*.

Selain menghasilkan berbagai program dan kegiatan, output dari proses kolaborasi percepatan

penurunan *stunting* di Kota Pekanbaru juga mencerminkan tingkat keterlibatan dan komitmen para pemangku kepentingan dalam menerjemahkan kesepakatan bersama ke dalam tindakan nyata. Setiap output yang dihasilkan, seperti pembentukan tim audit kasus *stunting* dan pelaksanaan mini lokakarya, menunjukkan bahwa kolaborasi tidak berhenti pada tahap perencanaan dan koordinasi, tetapi berlanjut pada implementasi yang bersifat operasional dan aplikatif. Hal ini menjadi indikator bahwa proses *collaborative governance* telah berjalan secara fungsional dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung di lapangan.

### **B.Inovasi Dalam Kolaborasi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Pekanbaru**

1. Program Dapur Sehat Atasi Stunting (Dapur Dashat),

Yaitu gerakan ibu-ibu di tingkat kelurahan yang memasak secara bersama-sama untuk menyediakan makanan bergizi bagi ibu hamil dan keluarga berisiko *stunting*.

2. Program Celengan Masyarakat Peduli Stunting (Cemara Canting)

Yaitu upaya pengumpulan dana melalui partisipasi masyarakat, perkantoran, dan dunia usaha yang dihimpun dalam bentuk celengan dan selanjutnya disalurkan kepada ibu hamil serta keluarga berisiko *stunting*.

3. Program Calon Pengantin Sehat, Layak, dan Berkualitas (Catin Selaras)

Yaitu program pelayanan kesehatan pranikah yang

mencakup pemeriksaan kesehatan fisik, konseling, serta pemberian dukungan gizi bagi calon pengantin dengan risiko Kekurangan Energi Kronis (KEK).

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penerapan *Collaborative Governance* dalam Program Pencegahan *Stunting* di Kota Pekanbaru Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *collaborative governance* dalam program pencegahan *stunting* masih menghadapi tantangan mendasar, terutama terkait belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur mekanisme kolaborasi lintas sektor. Ketiadaan regulasi yang kuat menyebabkan pelaksanaan kolaborasi berjalan tanpa landasan hukum yang jelas, sehingga peran, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing aktor tidak terstruktur dengan baik. Diperlukan regulasi untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta meningkatkan akuntabilitas dalam implementasi program pencegahan *stunting*.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Abdussamad, Zuchri. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Adiwijaya (2024). Metode Penelitian Kualitatif . Jambi : PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Adriani (2022). *Stunting Pada Anak*. PT Global Eksekutif Teknologi
- Ananda, F. D. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Program Pemerintah Kota Pekanbaru Mengenai Pemenuhan Hak Anak Di Kota Pekanbaru (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Riau).
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Donahue, J. D. & R. J. Z. (2021). *Collaborative Governance : Private roles for public goals in turbulent times*.
- Fiantika, F. R. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. Sumatera Barat : PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hardani et al., (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta : CV. Pustaka Ilmu.
- Hasan (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Jawa Tengah : Tahta Media Group
- Ifah Rofiqoh, Z. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kurniadi. (2021). *Collaborative Governance : Teori dan Implementasi*. Banyumas: CV. Pena Persada
- Labolo, M. (2023). Memahami Ilmu Pemerintahan. PT. Raja Grafindo Persada- Rajawali Pers
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Deepublish.
- Miftah, T. (2010). Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa dan Intervensi). Manajemen Kepemimpinan. Gava Media. Yogyakarta.
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal). Yogyakarta ; Yogyakarta Press.
- Naamy, N. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar & Aplikasinya. Nusa Tenggara Barat : Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah.
- Noor, M. (2022). *Collaborative Governance Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik*. Yogyakarta : Bildung.
- Rashid, F. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatid dan Kuantitatif: Teori, Metode dan Praktek. Jawa Timur : IAIN Kediri Press.
- Sahir, S. H. (2022). Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Penerbit KBM Indonesia
- Sulistyawati. (2023). Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif . Yogyakarta : K-Media.
- Skripsi**
- Anggraeni, W. (2022). *Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Penanganan Stunting*.
- Haq, Z. M. (2024). *Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting di Kabupaten Enrekang*
- Rahayu, S. (2023). Dinamika *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan *Stunting* di Kabupaten Bantaeng
- Resa, B. (2022). *Collaborative Governance* dalam Penanganan *Stunting* di Kabupaten Manggarai Timur

Trifany, N. (2023). *Collaborative Governance* dalam Penanganan Stunting di Kota Pekanbaru Tahun 2021-2022

#### Jurnal

- Adriani, P., Aisyah, I. S., Wirawan, S., Hasanah, L. N., Idris, Nursiah, A., Yulistianingsih, A., & Siswati, T. (2022). Stunting Pada Anak. In R. M. S. Oktavianis (Ed.), PT Global Eksekutif Teknologi (Pertama, o, Vol. 124, Issue November). PT GlobalEksekutif Teknologi. <https://www.researchgate.net/publication/364952626>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative Governance In Theory and Practice*. Journal of Public Administration Research and theory. 18(4), 543-571.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam, 1(2), 19. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 3(2), 200. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Dianti, Y. (2022). Collaborative Governance Pada Penerapan Perwali No 79 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Surabaya. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(04), 5–24. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>
- Hanyfa, M. R., & Eni Rustianingsih. (2024). Collaborative Governance Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Kesamben Kulon. *Journal Publicuho*, 7(3), 14711488. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.507>
- Kurniasih, D.-. (2017). Model Penguatan Kelembagaan Pada Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (Slbm) Di Kabupaten Banyumas (Suatu Pendekatan Collaborative Governance). *Sosiohumaniora*, 19(1), 1–7. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.7888>
- Muhamad, S. F. (2023). Pemerintah luncurkan Program PMT berbahan lokal untuk cegah stunting. <https://www.antaranews.com/berita/3542952/pemerintah-luncurkan-program-pmt-berbahan-lokal-untuk-cegah-stunting>
- Mustika, W., & Syamsul, D. (2018). Analisis Permasalahan Status Gizi Kurang Pada Balita di Puskesmas Teupah Selatan Kabupaten Simeuleu. Jurnal Kesehatan Global, 1(3), 127. <https://doi.org/10.33085/jkg.v1i3.3952>
- Nasrulhaq. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi*

- Publik, 6(3), 395.<https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.2261>
- Nindya Tiara Fatikha, A. P. (2023). *Collaborative Governance Dalam Penanganan Stunting*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 277.<https://doi.org/10.31258/jkp.v14i3.8308>
- Novita Suratman, F., & Darumurti, A. (2021). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik (Rthp) Di Kota Yogyakarta*. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (JPK)*, 2(2), 102.<https://doi.org/10.18196/jpk.v2i2.12743>
- Rukajar. (2021). Kesalahan Berbahasa Pada Penulisan Media Luar Ruang Di Barus Tapanuli Tengah. *Jurnal Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1(2), 2775–4693.
- Rukhmana, T. (2021). *Jurnal Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* Page 25. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 2(2), 28–33.
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15.
- Saufi, A. (2021). Dinamika Collaborative Governance dalam Penanggulangan Stunting Ditengah Pandemi Covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, 1(1), 80.<https://conference.trunojoyo.a>
- c.id/pu  
[b/semnaspk/article/view/40/47](https://semnaspk/article/view/40/47)
- Silviani, R., & Eriyanti, F. (2023). Faktor Pendukung dan Penghambat Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Air Bersih di Nagari Tluk Amplu Inderapura. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(2), 176–185.  
<https://doi.org/10.47134/villages.v4i2.54>
- Sofwatillah, Risnita, Jailani, M. S., & Saksitha, D. A. (2024). Teknik Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 79–91.
- Sukanti, S., & Faidati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Upaya Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Caraka Prabu*, 5(1), 91–113.  
<https://doi.org/10.36859/jcp.v5i1.418>
- Sumanti, R. (2024). Collaborative Governance: Strategi Pencegahan dan Penurunan Prevalensi Stunting. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(1), 13–26.  
<https://doi.org/10.47441/jkp.v19i1.361>
- Supratman. (2021). *KOLABORASI DAN KOMUNIKASI KELOMPOK MENURUT TEORI STRUKTURASI ANTHONY GIDDEN*. 03(04), 156–164.
- Suri, F. A., & Meiwanda, G. (2023). Implementasi Program Gizi Oleh Dinas Kesehatan Dalam Penurunan Stunting Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah*

- Wahana Pendidikan*, 9(17), 258–267. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8303918>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Tanzil, L., & Hafriani, H. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Stunting Pada Balita Usia 24-59 Bulan. *Jurnal Kebidanan Malahayati*, 7(1), 25–31. <https://doi.org/10.33024/jkm.v7i1.13390>
- Tomi Jepisa, L. W. (2023). Faktor Yang Beresiko Kejadian Stunting Pada Balita. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(8), 96. <https://journal-mandiracendikia.com/jikmc>
- Trifany, N. (2020). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGA NAN STUNTING DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2021-2022. *Journal GEEJ*, 7(2), 1–15.
- Trivaika, E., & Senubekti, M. A. (2022). Perancangan Aplikasi Pengelola Keuangan Pribadi Berbasis Android. *Nuansa Informatika*, 16(1), 33–40. <https://doi.org/10.25134/nuansa.v16i1.4670>
- Yanti, Elly Susilawati , Yessi Alza, L. S. (2023). Pendampingan Tim Percepatan Penurunan Stunting melalui Inisiasi dan Implementasi Dashat (Dapur Sehat Atasi Stunting) di Desa Pancuran Gading Kabupaten Kampar. Segantang Lada : Jurnal Pengabdian Kesehatan, 1(2), 86. <https://doi.org/10.53579/sega ntang.v1i2.137>
- Yuwantini, Y., Mulyaningrum, F. M., & Susanti, M. M. (2021). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Stunting Pada Balita Di Kabupaten Grobogan. *Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama*, 10(1), 74. <https://doi.org/10.31596/jcu.v10i1.1704>
- Peraturan Perundang-Undangan**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
  4. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 134 Tahun 2021 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting.
- Artikel Online**
- Adha, B. A. (2023). 115 pejabat Pemko Pekanbaru jadi orangtua asuh anak stunting. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/3531183/115-pejabat-pemko-pekanbaru-jadi-orangtua-asuh-anak-stunting>, Diakses pada 21 Agustus 2025.

- Ady,A .(2024).Kepala Disdalduk KB Pekanbaru Salurkan Bantuan Program BAAS Untuk Anak *Stunting* di Kecamatan Limapuluh. AmiraRiau.Com.  
<https://amirariau.com/kepala-disdalduk-kb-pekanbaru-salurkan-bantuan-program-baas-untuk-anak-stunting-di-kecamatan-limapuluh>. Diakses pada 21 Agustus 2025.
- Center, M. (2024). *Turunkan Angka Stunting Melalui Program BAAS*.  
<https://palangkaraya.go.id/turunkan-angka-stunting-melalui-program-baas/>. Diakses pada 20 November 2024
- Fernando. (2023). *Kasus dan Resiko Stunting di Pekanbaru Terus Menurun*. GoRiau.Com.  
<https://m.goriau.com/berita/baca/kasus-dan-resiko-stunting-di-pekanbaru-terus-menurun.html>. Diakses pada 21 Agustus 2025.
- Hidayat, R. (2024). *Tangani Stunting, Pemko Pekanbaru Kembali Jalankan Program BAAS*. Cakaplah.Com.  
<https://www.beritasatu.com/network/cakaplah/193489/tangani-stunting-pemko-pekanbaru>
- kembali-jalankan- program-baas. Diakses pada 21 Agustus 2025.
- Pahlepi, R. D. (2022). *Data Primer : Pengertian, Fungsi, Contoh, dan Cara Mendapatkannya*. Detik.Com.  
<https://www.detik.com/bali/berita/d-6422332/data-primer-pengertian-fungsi-contoh-dan-cara-mendapatkannya>. Diakses pada 15 Maret 2024
- Pekanbaru,B. (2024). *Tahun Lalu Dianggarkan RP42 Miliar, Pemko Pekanbaru Berhasil Turunkan Angka Stunting*. PEKANBARU.GO.ID. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/tahun-lalu-dianggarkan-rp42-miliar-pemko-pekanbaru-berhasil-turunkan-angka-stunting>. Diakses pada 20 November 2024.
- Yusuf, M. (2023). *Kedua Kalinya Kabupaten Pekanbaru Salurkan Program BAAS*. Siberone.Com.  
<https://siberone.com/news/detail/27040/kedua-kalinya-kabupaten-pekanbaru-salurkan-program-baas>. Diakses pada 21 Agustus 2025.